

**KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM
PARTISIPASI POLITIK MASYRAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018****Ine Mariane¹, Rudy²**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pasundan^{1,2}
Jl. Tamansari No.6-8 Kota Bandung, 426222 Jawa Barat. Indonesia

Email:ine.mariane@unpas.ac.id¹Rudyf2011@gmail.com²**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat 2018. Desain pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah perwakilan dari pegawai KPUD Bandung Barat dan perwakilan masyarakat yang dianggap berkompeten. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara Snowball sampling yaitu informan kunci menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang diteliti untuk melengkapi keterangannya. Hasil penelitian dapat di deskripsikan diantaranya: Paparan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, Paparan data dari segi kluster pemilih, Paparan data dari segi program kegiatan, dan Paparan dari segi pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat 2 (dua) pengaruh partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yaitu pemilih strategis dan pemilih dalam kategori kelompok rentan.

Kata Kunci: Kinerja, Partisipasi Pemilih

Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu upaya makro dalam pelaksanaan Good Governance melalui pemilihan umum yang dapat mendorong reformasi elektoral. Pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bertugas mewujudkan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilihan Umum di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1955 yang dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante atau yang saat ini disebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR). Pemilihan umum di Indonesia tidak hanya dilaksanakan dalam pemilihan umum nasional Presiden, Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan kepala Daerah juga termasuk dalam pemilihan umum, sebelum tahun 2005 Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), namun pada Juni 2005 Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Pertama kali dilakukan. Dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota dan diawasi langsung oleh badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang kemudian disebut KPUD memiliki tugas yang terdiri dari menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di daerah, mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum, kemudian memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. Selain memastikan pelaksanaan pemilihan umum KPUD

juga berperan melaksanakan persiapan penyelenggaraan pemilu secara adil dan merata melalui penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Penyampaian informasi ini tentu saja akan membantu masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara politik. Partisipasi politik masyarakat memiliki peranan penting juga sebagai upaya control masyarakat terhadap pemerintahan. Melalui partisipasi politik masyarakat juga dapat memenuhi hak politiknya sebagai warga negara yang baik. KPUD dalam hal ini tentu saja bertugas melaksanakan kinerjanya selaku pelaksana Pemilihan umum di daerah Provinsi, Kabupaten/kota.

Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 16 Kecamatan, 165 Desa dan 320 Tempat Pemungutan Suara atau TPS, wewenang terhadap penyelenggaraan pemilu di daerah berada di tangan KPUD atau Komisi Pemilihan Umum Daerah yang memegang tugas utama untuk membuat persiapan pemilihan Bupati dan Wakil bupati. Namun pada laporan penyelenggaraan Pemilihan umum atau Pemilu untuk Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018 Daftar pemilih tetap menurut Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bandung Barat berjumlah 950.566 hanya memberikan 69% partisipasinya atau 617.867 partisipan yang ikut memberikan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati Bandung Barat yang jika dibandingkan dengan jumlah partisipasi pada tahun 2013 dengan jumlah DPT 940.450 dengan partisipan berjumlah 705.338 atau 75% dari jumlah DPT. Berdasarkan prariset diketahui bahwa Rendahnya tingkat Pemilihan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 disebabkan oleh terbatasnya jumlah pilihan Pasangan calon, kemudian terdapat perbedaan antara kampanye dengan realitas politik dan persepsi masyarakat terkait dengan bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dapat dipahami secara politis kemudian jumlah kegiatan sosialisasi pada tahun 2018 terbatas dikarenakan sarana dan prasarana sosialisasi belum cukup mendukung.

Komisi Pemilihan Umum memiliki kewajiban dalam peningkatan partisipasi Masyarakat (Saifudin et al., 2021). KPUD Kabupaten Bandung Barat selaku Lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pemilihan umum serta mengupayakan peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui secara rinci mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018 serta mengetahui apa saja faktor penghambat Kinerja Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Tinjauan Pustaka

Kinerja banyak diartikan sebagai Hasil kerja yang memiliki makna luas. Strategi adalah Langkah dalam perencanaan guna mencapai tujuan melalui praktek operasional, (Malik, 2019) Kinerja dapat dijadikan acuan untuk melihat peningkatan maupun penurunan pelaksanaan kerja serta pencapaian kerja pegawai. (Lestari et al., 2020) kinerja komisi pemilihan Umum ditentukan oleh strategi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kinerja memuat tata cara pelaksanaan pekerjaan dimana setiap pelaksanaan pekerjaan atau program sangat membutuhkan strategi. (Tangkilisan, 2009) strategi dikenal sebagai proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun birokrasi dengan tujuan memaksimalkan hasil dari suatu program. (Salusu, 1996) strategi mencakup tipe-tipe yang terdiri dari strategi organisasi yakni berupa misi, visi, tujuan dan nilai-nilai inisiatif, kemudian strategi program yakni strategi yang menggambarkan dampak, pengertian, tolak ukur, dan penanggulangan suatu program, kemudian Strategi Pendukung Sumber daya manusia yakni pemaksimalan terhadap manfaat sumber-sumber daya yang esensial, serta strategi kelembagaan yakni strategi yang berfokus pada pengembangan kemampuan strategi

dalam melaksanakan inisiatif strategis. (Amantha & Ferdian, 2021) Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah didukung oleh Organisasi Politik yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, fasilitas dan sumber daya partisipan yang ada. Kinerja komisi pemilihan Umum daerah diantara meliputi memastikan partisipan, memastikan calon bupati dan wakil bupati, dan tentunya memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan baik, serta melakukan penghitungan pemungutan suara secara cepat, tepat dan efisien (Adi, 2020). Kinerja yang baik dalam Komisi pemilihan umum tentu akan meningkatkan penyelenggaraan dan peningkatan partisipasi pemilihan umum (Siti & Salisah, 2019). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dapat diukur melalui peningkatan partisipasi pemilihan umum daerah (Muharis, et al, 2021).

Partisipasi pemilihan umum merupakan partisipasi masyarakat dalam politik atau disebut partisipasi politik, Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan *Good Governance*. (Wardhani, 2018) Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum sangat penting sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif. Partisipasi masyarakat sebagai pemilih merupakan bagian penting dalam sebuah pemilihan umum (Arniti, 2020). (Priandi & Roisah, 2019) pemilihan umum merupakan komporasi upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dalam pelaksanaan good governance melalui pemilu baik ditingkat daerah maupun ditingkat nasional (Wibawa, 2019). Partisipasi politik masyarakat daerah dalam pemilihan umum secara aktif dilakukan melalui penggunaan hak suara masyarakat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum daerah (Hemafitria & Novianty, 2021).

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif menekankan pada catatan penggambaran situasi secara realistis sebagai pendukung penyajian data peneliti (Sutopo, 2002). Peneliti berupaya mendeskripsikan peristiwa alih kode dan campur kode dalam jumlah partisipasi pemilih yang tidak mencapai target nasional di KPUD Bandung Barat berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data primer terdiri dari data yang ditemukan langsung melalui penelitian secara langsung dan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Setelah itu dilakukan pengujian validitas data melalui Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan kepala Daerah dilaksanakan melalui proses yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum yang efektif dapat terlaksana melalui integritas tinggi yang dimiliki oleh KPUD selaku penyelenggara yang memiliki tugas utama merencanakan, menetapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melakukan pengendalian dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan umum daerah, dilakukan melalui upaya-upaya seperti membuat Kebijakan pelaksanaan sosialisasi pemilihan kepala daerah dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, dimana menurut Peraturan Komisi pemilihan Umum No 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum baik provinsi maupun daerah. Upaya pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab ini Komisi Pemilihan Umum Daerah berwenang untuk melaksanakan pengaturan ruang lingkup keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan evaluasi pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah berwenang untuk mengatur pihak yang akan berpartisipasi, serta Komisi Pemilihan Umum Daerah berwenang untuk menolak atau menerima partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam melaksanakan tanggung jawabnya Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupate Bandung Barat bertanggung jawab meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan Sosialisasi oleh KPUD Bandung Barat memiliki sasaran utama yakni seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi Formal yang dilakukan melalui Lembaga-lembaga berwenang, dan sosialisasi informal yang bersifat kekeluargaan atau pertemuan tidak resmi. Tujuan utama sosialisasi ini dilakukan sebagai Langkah utama meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih sistematis dan terbina. (Gleko et al., 2017) Komisi Pemilihan Umum memiliki kewajiban dalam melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan sinergis dan terbina. Untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif KPUD Bandung Barat membentuk program relawan demokrasi yang melibatkan kelompok masyarakat. Tujuan program relawan demokrasi ini, yakni (1) meningkatkan Kualitas Proses pemilu di Kabupaten Bandung Barat; (2) meningkatkan partisipasi pemilih; (3) meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; serta (4) membangkitkan jiwa masyarakat sipil untuk ikut secara sukarela dalam agenda pemilu dan demokrasi di Bandung Barat. Menurut (Delmana et al., 2019) kualitas pemilu dibangun oleh seluruh aspek proses tata Kelola pemilihan umum dimana terdapat umpan balik atas pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung.

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk (1) Keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu; (2) Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu; (3) Sosialisasi Pemilu; (4) Pendidikan Pemilih; dan (5) Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sosialisasi informal yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan dengan harapan menurunkan angka suara tidak sah atau *invalid vote* dalam pemilu. Partisipasi Masyarakat yang tinggi di suatu daerah dapat menjamin bahwa pelaksanaan hak politik masyarakat di daerah tersebut berjalan dengan baik (Hasibuan, et al., 2018)

Dalam situasi saat ini diperlukan pemanfaatan teknologi informasi secara transparan untuk memberikan informasi hasil Pemilu atau Pemilihan lebih cepat dan akurat. Adapun teknologi informasi yang digunakan oleh KPUD Bandung Barat yaitu :

- 1) Fanpage FB : @kpukablBandungbarat
- 2) Instagram : @kpukabbandungbarat
- 3) Website : <https://kab-bandungbarat.kpu.go.id/>
- 4) Twiter : @kpubandungbarat
- 5) Kanal Youtube : @kpubandung

Upaya KPUD Bandung Barat dalam menentukan target sosialisasi juga merupakan Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan mengelompokkan sasaran yang terbagi atas, (1) Pemilih Strategis, yakni Pra Pemilih, Pemilih Pemula, Perempuan, kelompok Marginal, penyandang disabilitas dan agamawan serta kelompok rentan yakni kelompok dengan partisipasi pemilih rentan. Rencana Target partisipasi yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Bandung Barat sesuai dengan rencana partisipasi pemilihan umum nasional yakni 77,5%. Sedangkan Berdasarkan hasil perhitungan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat 2018 didapatkan tingkat partisipasi sebesar 69,7% Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi kinerja KPUD Bandung Barat.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa menurunnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa daerah yang kerap mengalami konflik oleh sebab itu untuk saat ini KPUD mempersiapkan melalui pemetaan wilayah konflik serta berkoordinasi dengan stakeholders dan pihak terkait dalam pemilu berikutnya. Kegiatan koordinasi KPUD dilakukan Bersama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu Bandung Barat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa KPUD Bandung Barat telah melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya untuk melakukan peningkatan Partisipasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum No 10 Tahun 018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. (Candranegara, 2017) Peran KPUD dalam partisipasi politik masyarakat yakni menjalankannya tugasnya melalui peran normatif.

Faktor Penghambat Partisipasi

Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung Barat pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil bupati tahun 2018 disebabkan oleh beberapa permasalahan, yakni (1) keterbatasan Kampanye para calon sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal dan bingung dalam menentukan pilihan; (2) Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD masih belum optimal karena terdapat beberapa daerah yang masih sangat sulit untuk dijangkau; (3) stigma yang berkembang dimasyarakat bahwasannya siapapun pemimpinnya mereka tetap akan kesusahan hal tersebut membuat masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Demokrasi. (Akbar et al., 2021) Faktor penghambat akan sangat mempengaruhi hasil dari partisipasi politik masyarakat.

Kesimpulan

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kinerja KPUD Bandung Barat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan tugas sudah mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia khususnya terkait Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

- dan Partisipasi Masyarakat. Dengan melakukan pemetaan pemilih sebagai upaya sosialisasi agar tepat sasaran, dan juga berkoordinasi dengan stake holder dengan harapan dapat mencapai target partisipasi pemilih sesuai dengan rencana strategis nasional. capaian partisipasi pemilih saat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat 2018 sebesar 69,7%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan belum tercapainya target nasional partisipasi pemilih sebesar 7,8%.
2. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, yakni terdiri dari keterbatasan kampanye para calon bupati dan wakil bupati, kemudian stigma masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat yang masih sangat rendah.

Daftar Pustaka

- Adhan, M., Jufrizen, J., Prayogi, M. A., & Siswadi, Y. (2020). Peran mediasi komitmen organisasi pada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dosen tetap universitas swasta di kota Medan. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1-15.
- Aldo, D., Putra, N., & Munir, Z. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Dosen Dengan Menggunakan Metode Multi Attribute Utility Theory (Maut). *JURSIMA (Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen)*, 7(2), 76-82.
- Aqip, M. A. I. (2020). Analisis kepuasan mahasiswa terkait kinerja pembelajaran daring oleh dosen via aplikasi Whatsapp Grup. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(3), 141-153.
- Arif, A., & Putrawansyah, F. (2021). Pelatihan Pengisian BKD Sertifikasi Dosen STT Pagar Alam. *Ngabdimas*, 4(01), 23-28.
- Asnawi, M. F., & Baihaqy, M. A. M. (2019). Implementasi Metode Simple Additive Weighth (SAW) pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Dosen Berprestasi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), 198-205.
- Barusman, A. R. P., & Oktaviannur, M. (2019). Analisis Pengaruh Pemberian Kompensasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. *VISIONIST*, 8(2).
- Barusman, M. Y., Citra, A., Oktavianur, M., & Redaputri, A. (2020). Pengambilan Keputusan Penempatan Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara (ASN). *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 6(3), 459-459.
- Budisetyani, I. G., & Swandi, N. L. (2019). Kebutuhan psikologis pada pecandu narkoba (Tinjauan kualitatif dengan teknik journaling sebagai metode penggalian data). *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(2), 400-407.
- Hafid, H., & Fajariani, N. (2019). Hubungan profesionalisme, komitmen organisasi dan kinerja dosen pada stie muhammadiyah mamuju. *Kinerja*, 16(1), 58-68.
- Handayani, F., Barusman, M. Y. S., & Oktaviannur, M. (2021). PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. *VISIONIST*, 10(1), 29-34.
- Irham, M. (2019). Analisa Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Dosen Fakultas Ekonomi UMN). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 436-456.
- Iskandar, F. A., Iskandar, I., & Wijayanti, L. (2022). Kompetensi Pustakawan Dalam Manajemen Pengembangan Koleksi Di Perpustakaan Perguruan Tinggi: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Ilmu Perpustakaan (JIPER)*, 4(2).
- Jufrizen, J., Farisi, S., Azhar, M. E., & Daulay, R. (2020). Model Empiris Organizational Citizenship Behavior dan Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Medan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(2), 145-165.
- Laili, R. N., & Nashir, M. (2020). Pelatihan TOEP (Test of English Proficiency) bagi Dosen

- STIKES Banyuwangi untuk persiapan Sertifikasi Dosen. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 487-497.
- Listyarini, D. (2017, May). Pengaruh pemberian sertifikasi dosen, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja dosen perguruan tinggi swasta kota Semarang. In *PROCEEDINGS* (Vol. 1, No. 1).
- Mangkunegara, A. P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, W., & Juhji, J. (2020). Integrasi Budaya Prestasi pada Fungsi Perencanaan Pembinaan Mutu Dosen. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 1-12.
- Nugraha, H. A. (2021). PELAKSANAAN SERTIFIKASI BAGI DOSEN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA DOSEN (Studi Pada Universitas Ekasakti). *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(1), 19-25.
- Nusantari, D. O. (2022, August). Sertifikasi Dosen, Sebuah Amanat Untuk Kemajuan Pendidikan Bangsa. In *SINASIS (Seminar Nasional Sains)* (Vol. 3, No. 1).
- Sanga, L. D. (2022). Dosen Adalah Penegak Masalah Etika Profesi. *TRACTARE*, 5(1), 10-15.
- Saputra, Y. N. (2020). Pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan kompensasi terhadap kinerja dosen. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 18(1), 118-135.
- Saputra, Y. N. (2022). Mini Review: The Competencies of Christian Religious Teacher. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 18(1), 94-104.
- Sastypratiwi, H., & Nyoto, R. D. (2020). Analisis Data Artikel Sistem Pakar Menggunakan Metode Systematic Review. *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, 6(2), 250-257.
- Setiawan, I. P., Liong, H., & Sani, A. (2020). Pengaruh Pelatihan, Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Dosen Pada Stia Al-Gazali Barru Kabupaten Barru. *Jurnal Mirai Management*, 5(3), 213-224.
- Tasbih, tasbih. 2021. Peran Dosen Terhadap Pembinaan Mahasiswa Berbasis Kompetensi. *Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*. 8 (1). 57-70
- Wahyudi, W. (2020). Kinerja Dosen: Kontribusinya Terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 401-410.
- Wahyudi, W., & Sunarsi, D. (2021). Manfaat penerapan manajemen pengetahuan bagi kinerja dosen di masa pandemi Covid-19. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(2), 285-291.
- Yasin, V. (2021). Penerapan sistem kegiatan belajar dan mengajar dalam instrumen sertifikasi dosen profesional menggunakan metode SMART. *TRIDHARMADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta*, 1(1), 37-55.
- Yulita, T. (2021). Korelasi kemampuan mengajar daring dosen terhadap motivasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh.
- Putra, R. B., & Fitri, H. (2021). Literature Review: Model Pengukuran Kinerja Dosen Dan Organizational Citezenship Behavior Berdasarkan Karakteristik Individu, Budaya Kerja Dan Perilaku Individu. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(4), 485-512.
- Piscayanti, K. S. (2015). Pengaruh Sertifikasi Dosen Terhadap Kinerja Pengajaran Dosen Undiksha. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1).
- Zainuddin, Muhamad, dkk. 2014. Buku pedoman sertifikasi pendidik untuk dosen (Serdos) terintegrasi: buku 1 naskah akademik. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemdikbud. Piscayanti, Kadek Sonia, dkk. 2015. Pengaruh Sertifikasi Dosen Terhadap Kinerja Pengajaran Dosen Undiksha. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.

1(4).

Jamal, Ma'aruf. 2009. *Manajemen Pendidikan Anak*. Yogyakarta: Diva.

Kusnandar (2008). *Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Edwarad III. 1998. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press: the University of Michigan